

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, semakin banyak perusahaan-perusahaan publik yang tergantung pada modal ekstern (modal ekuiti serta pinjaman) yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan perusahaan, melakukan investasi serta menciptakan pertumbuhan. Hal ini akan membuat perusahaan-perusahaan tersebut dituntut untuk lebih terbuka dalam mengelola perusahaannya. Dengan adanya keterbukaan, investor dapat memantau keadaan keuangan pada suatu perusahaan. Para investor akan lebih percaya untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang transparan dan dapat dipercaya. Disamping itu, perusahaan perlu memastikan kepada para investor bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian ini akan diberikan oleh suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan investor, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut akan membantu terciptanya lingkungan yang

Krisis ekonomi yang melanda di beberapa negara, menyebabkan terbukanya perhatian dunia Internasional terhadap pentingnya penerapan *corporate governance*. Terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta jatuhnya perusahaan-perusahaan besar telah menurunkan kepercayaan para investor sehingga mereka melarikan dananya ke perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance*. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI,2001)*, negara-negara donor dan lembaga-lembaga investasi dunia mulai mensyaratkan sistem *corporate governance* yang sehat pada perusahaan yang ingin mendapatkan dana investasi. Kebijakan ini kemungkinan besar akan dianut oleh banyak lembaga – lembaga investor di seluruh dunia, karena lembaga-lembaga investor dunia sendiri mengalami pengawasan yang semakin tajam dari para pemegang sahamnya.

Pemerintah dan asosiasi-asosiasi bisnis pada beberapa negara, baik negara industri maupun negara berkembang, semakin menyadari pentingnya *corporate governance*, dan mensyaratkan untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang mendapat modal dari publik dan investor. Sejak tahun 1992, puluhan negara telah memulai prakarsa-prakarsa nasional untuk memperbaiki sistem *corporate governance* pada perekonomian mereka. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, Brazil, Korea Selatan, Thailand, Malaysia dan India telah menyusun laporan keuangan nasional dan mulai melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disusun oleh para ahli pada level pemerintahan dan level perusahaan, hal ini sebagai

Suatu penelitian yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company (2000) yang dikutip oleh Sulistyanto dan Prapti (2003) telah memberikan indikasi bahwa para manajer di Asia akan membayar 26-30% lebih premium untuk saham-saham perusahaan dengan *corporate governance* yang baik daripada untuk perusahaan-perusahaan dengan *corporate governance* yang masih meragukan. Hal ini berarti bahwa negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik akan mempunyai akses yang lebih baik terhadap sumber dana internasional dibandingkan dengan negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki *corporate governance* yang baik. Negara-negara dengan standar-standar *corporate governance* yang rendah semakin sering dikucilkan dari daftar negara-negara di mana dana-dana internasional diizinkan untuk melakukan investasi.

Memburuknya keadaan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini, dimana masih banyaknya perusahaan yang bangkrut, buruknya kinerja perbankan nasional serta banyaknya kredit macet, yang ditengarai oleh berbagai pihak disebabkan karena selama ini Indonesia belum menerapkan *good corporate governance* sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Media Akuntansi 2000; Syahrozal 2000; Sulhva 2000; Prakarsa 2000, dalam Indrayani dan Nurkholis, 2001)). Terdapat sinyal-sinyal bahwa krisis ekonomi tersebut dipicu oleh krisis disektor publik yang selama ini banyak menerapkan *bad corporate governance* yang berakibat pada pengambilan keputusan yang salah serta buruknya manajemen yang pada akhirnya menyebabkan risiko finansial akibat tingginya utang pemerintah dan dunia usaha

Kinerja perusahaan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah kegagalan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencanaan strategis. Dimensi lain penyebab buruknya kinerja perusahaan secara umum adalah pelanggaran terhadap etika bisnis.

Namun demikian, krisis ekonomi yang terjadi telah membawa efek penting yaitu meningkatnya *concern* masyarakat terhadap pentingnya penerapan *good corporate governance* yang sekaligus telah menjadi isu sentral dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dimasa yang akan datang.

Di negara-negara Asia, pelaksanaan *corporate governance* merupakan bagian penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mutlak untuk mengatasi krisis ekonomi. Indonesia, sebagai salah satu negara di Asia yang terkena krisis ekonomi sangat mendukung pelaksanaan *corporate governance* sebagai salah satu langkah mengatasi krisis. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan sistem *corporate governance* ini adalah dengan menerbitkan dan membuat peraturan yang meliputi: (1) pendaftaran perusahaan, (2) pengungkapan data perusahaan dan (3) peraturan tentang tanggung jawab komisaris dan direksi.

Usaha-usaha untuk memperbaiki *corporate governance* oleh pemerintah Indonesia ini merupakan bagian penting dari Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) yang ditandatangani Indonesia dengan IMF, dan bantuan keuangan dari pihak IMF

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar *corporate governance* yang telah diterapkan oleh tingkat internasional (Sulistyanto dan Lidyah, 2002, dalam Sulistyanto dan Prapti, 2003). Hal senada juga disampaikan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), yang berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab terutama untuk memperhatikan standar-standar *corporate governance* yang telah disepakati sebagai *best practices* di tingkat internasional. Bukan hanya perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai tanggung jawab tersebut. Setiap perusahaan di Indonesia harus menyadari betapa pentingnya suatu sistem *corporate governance* bagi kepentingan-kepentingan pemegang sahamnya, para penyandang dana, karyawannya, dan pada akhirnya pada perusahaan itu sendiri. Sama seperti di negara-negara lain, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mengantisipasi pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang telah ada, pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru, serta pengawasan dari masyarakat yang semakin tajam terhadap tindakan-tindakan perusahaan-perusahaan tersebut.

Banyak perusahaan yang telah menyadari pentingnya penerapan sistem *corporate governance* bagi perusahaannya, tetapi banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan di Indonesia yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan sistem *corporate governance* hanya sebagai prosedur administratif untuk memenuhi tuntutan

yang menganggap sistem tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan (*corporate culture*). (YPPMI & SC, 2002, dalam Sulistyanto dan Prapti, 2003).

Untuk mendorong penerapan sistem *corporate governance* dan meningkatkan kualitas keterbukaan dalam informasi keuangan, beberapa institusi seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jendral Pajak (DJP), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) akan memberikan penghargaan kepada perusahaan publik yang dinilai telah memberikan informasi yang paling terbuka dalam laporan keuangan tahunannya dibandingkan perusahaan-perusahaan lain (Warta Ekonomi, 2002; Bapepam, 2002 dalam Sulistyanto dan Prapti, 2003). Penghargaan yang diberikan adalah *Annual Report Award* (ARA) yang diberikan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan, khususnya untuk informasi mengenai profil perusahaan, pengungkapan visi dan misi perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan *corporate governance*, analisis dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan pasar modal yang berlaku dan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan *stakeholder* (Bapepam, 2002 dalam Sulistyanto dan Prapti, 2003). Penghargaan ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi upaya pemulihan kepercayaan investor dan pemulihan ekonomi nasional pada umumnya.

Di Indonesia sendiri penelitian mengenai *corporate governance* telah beberapa kali dilakukan Sulistyanto dan Prapti (2003) dan Prapti dan Sulistyanto (2003).

penerapan sistem *corporate governance* dapat menekan manipulasi laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan manipulasi sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan sistem tersebut. Hal ini mengindikasikan belum berhasilnya penerapan *corporate governance* di Indonesia. Mayangsari dan Murtanto (2002) menguji apakah pengumuman pembentukan komite audit (*audit committee*) yang merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan *corporate governance* di Indonesia akan direspon oleh pasar. Penelitian tersebut membuktikan adanya reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman tersebut mempunyai kandungan informasi (*information content*) yang menarik minat investor di pasar.

Secara empiris terbukti bahwa investor bersedia memberi premium yang cukup tinggi kepada perusahaan yang menerapkan prinsip *corporate governance* secara konsisten (Lukuhay, 2002; Rafick, 2002 dalam Sulistyanto dan Prapti 2003). Survei yang dilakukan oleh McKinsey juga menemukan bukti tambahan bahwa perusahaan yang di survei menikmati valuasi pasar sampai dengan 10-12%. Hal ini merefleksikan kepercayaan investor terhadap konsep *corporate governance* tersebut. Selain itu, bukti empiris yang dikemukakan Beasley et al., (1996) yang dikutip oleh Sulistyanto dan Prapti (2003) juga menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan sistem *Corporate Governance* akan cenderung meningkat kinerjanya. Sejalan dengan penelitian tersebut, survei yang dilakukan terhadap 189 perusahaan publik di enam

menunjukkan kaitan yang erat antara penerapan *corperate governance* dengan harga saham perusahaan-perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan hampir 75% investor menganggap keterbukaan dan informasi mengenai *corperate governance* sama pentingnya dengan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan. Bahkan Lukuhay (2002) yang dikutip oleh Sulistyanto dan Prapti (2003) menyatakan bahwa beberapa perusahaan menganggap informasi mengenai penerapan sistem *corperate governance* tersebut lebih penting daripada laporan keuangan perusahaan

Masalah *corpotare governance* memang sudah mulai menjadi perhatian umum sejak krisis yang melanda di beberapa negara Asia terutama yang berkaitan dengan kebijakan pendanaan perusahaan (Husnan, 2001; Wahidahwati, 2002; Sloan, 2001 dalam Sunarto, 2003). Bahkan Husnan (2001) yang dikutip oleh Sunarto (2003) menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan berhubungan positif dengan *corpotare governan* yang diukur dengan ROE. Sementara Sloan (2001) yang dikutip oleh Sunarto (2003) menyatakan bahwa ukuran keberhasilan yang dicapai manajemen dalam mekanisme *governance* tercermin dalam besarnya *return on capital* yang ditanamkan oleh penyandang dana.

Sementara Bushman dan Smith (2001) yang dikutip oleh Sunarto (2003) mengukur *corpotare governan* yang diukur dengan beberapa faktor antara lain: *country indicator*, *industry indicator*, *agency conflict* dan *accounting quality*. Dari beberapa faktor tersebut Bushman dan Smith (2001) menekankan pada dua faktor

apakah *agency conflict* dan *accounting quality* berhubungan dengan *corporate governance* dan kinerja pasar modal.

Berdasarkan uraian tersebut maka sangat dimungkinkan bahwa kebijakan pendanaan yang dilakukan oleh manajemen akan mempengaruhi *corporate governance*. Disamping kebijakan pendanaan, *corporate governance* juga akan dipengaruhi oleh kualitas informasi akuntansi (Bushman dan Smith, 2001). Dari sudut pandang akuntansi, *corporate governance* antara lain dipengaruhi kualitas *disclosure* (Bushman dan Smith, 2001; Sloan, 2001 dalam Sunarto, 2003) dan rasio keuangan (Bushman dan Smith, 2001).

Rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisa rasio merupakan suatu teknik analisa yang dalam banyak hal mampu memberikan petunjuk dan gejala-gejala yang timbul disekitar kondisi yang melingkupinya. Rasio adalah suatu rumusan secara matematis dari hubungan atau korelasi antara suatu jumlah dengan nilai tertentu lainnya. Salah satu rasio keuangan yang dapat dipakai adalah *Price Earning Pershare* (PER). Melalui *earning*, yang disampaikan dalam laporan keuangan, suatu perusahaan dapat memberi informasi kepada investor mengenai kinerja perusahaan selama periode terakhir (Arifin, 2003). Dari *earning* tersebut investor tidak hanya mengetahui kinerja perusahaan pada periode yang lalu tetapi juga dapat memprediksi prospek perusahaan pada periode yang akan datang.

Sejalan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti

praktek penerapan sistem *corperate governance* oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio keuangan perusahaan (*financial ratios*) yang diwakili oleh *Preice Earning Pershare*, dimana penelitian ini akan mengambil judul "ANALISIS HUBUNGAN PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA".

B. Rumusan Masalah

Corperate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholders* yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder* (YPPMI & SC, 2002 dalam Sulistyanto dan Prapti, 2003). Berdasarkan uraian tersebut, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Apakah praktek penerapan sistem *corperate governance* akan berhubungan positif terhadap

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba meneliti apakah penerapan *corporate governance* akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Dimana penilaian terhadap *corporate governance* akan dilakukan terhadap 5 bidang yang dianggap berpengaruh terhadap terciptanya *good corporate governance*.

Adapun kelima bidang yang menjadi bobot penilaian dalam penelitian ini adalah:

1. Hak-hak Pemegang Saham;
2. Kebijakan *corporate governance*;
3. Praktek-praktek *corporate governance*;
4. Pengungkapan (*Disclosure*); dan
5. Fungsi Audit

Sementara kinerja keuangan suatu perusahaan akan dinilai dengan Price Earning Pershare suatu perusahaan pada tahun 2004.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di peroleh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menilai kualitas tata kelola (*governance*) pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan bukti secara empiris sejauhmana penerapan sistem *corporate governance* akan

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan bukti empiris tentang hubungan penerapan *corperate governunce* terhadap kinerja perusahaan yang diwakili oleh *Price Earning Pershare*
2. Menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya
3. Memperkaya hasil penelitian tentang hubungan penerapan *corperate*